

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kondisi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang disingkat (DIY) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak dibagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dari Sensus penduduk 2010, jumlah penduduk DIY tahun 2013 tercatat 3.594.854 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,40 persen dan penduduk perempuan 50,60 persen. Menurut daerah, persentase penduduk kota mencapai 66,09 persen dan penduduk desa mencapai.¹

Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat DIY sering disebut dengan istilah Jogja, Yogya, Yogyakarta, atau Jogjakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI

¹D.I. Yogyakarta Dalam Angka 2014, BAB 3. *Penduduk Dan Tenaga Kerja*. Hal 63.

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta telah terkenal ditingkat nasional, dan internasional, dan lebih menonjol terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah provinsi Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014 yang berimbas sampai ke DIY.

Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta yang secara administratif Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam suatu kota dan empat kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan administrasi sendiri. Daerah Istimewa Yogyakarta disebelah barat dan tenggara dikelilingi oleh barisan pegunungan di sebelah utara oleh gunung Merapi. Pegunungan di bagian selatan, terutama di Kabupaten Gunung Kidul mencapai ketinggian sampai 700 m. Faktor cuaca yang terdapat di DIY menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun dengan suhu rata-rata yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan ditempat-tempat yang lebih tinggi suhunya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada musim.

Musim hujan dimulai pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari bulan April sampai bulan September. Jumlah curah hujan dalam jangka waktu satu tahun mencapai 2.012 MM/Tahun, intensitas tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai

Maret, dimana curah hujan perbulan mencapai lebih dari 300 mm setiap m². Selama musim kemarau angin muson bertiup dari timur dan hujan turun kurang lebih 3 mm setiap m².

2. Sejarah

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut *Zelfbestuurlandschappen* atau Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam suatu kontrak politik. Kontrak politik Kasultanan yang terakhir tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia Internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya, wilayah, dan penduduknya. Setelah

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta, dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara Keatuan Republik Indonesia, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dinyatakan dalam:

- a. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
- b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
- c. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai daerah Otonom setingkat provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan undang-undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku.

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 desember 1949 DIY pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam X, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

3. Letak Georafis

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak dibagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis DIY terletak pada $8^{\circ} 30'$ - $7^{\circ} 20'$ Lintang Selatan, dan $109^{\circ} 40'$ - $111^{\circ} 0'$ Bujur Timur. Wilayah administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

1. Kota Yogyakarta (luas $32,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan)
2. Kabupaten Bantul (luas $506,85 \text{ km}^2$, terdiri dari 17 kecamatandan 75 desa)
3. Kabupaten Kulon Progo (luas $586,27 \text{ km}^2$, terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa)
4. Kabupaten Gunungkidul (luas $1.485,36 \text{ km}^2$, terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa)
5. Kabupaten Sleman (luas $574,82 \text{ km}^2$, terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa)

Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi gunungapi merapi, satuan fisiografi pegunungan sewu atau pegunungan seribu, satuan fisiografi pegunungan kulon progo, dan satuan fisiografi dataran rendah. Satuan fisiografi gunung api merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran *fluvial* gunung api termasuk juga bentang lahan *vulkanik*, meliputi daerah Sleman, kota Yogyakarta dan

sebagian daerah Bantul. Daerah kerucut, dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunung api aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.

Kars mendominasi struktur rupa bumi di wilayah Gunungkidul bagian selatan satuan pegunungan selatan atau pegunungan seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus, kekurangan air permukaan dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (*Wonosari Basin*) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi *Plato Wonosari* (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses *solusional* (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping, dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal, dengan vegetasi penutup sangat jarang.

Satuan pegunungan Kulon Progo yang terletak di Kulon Progo bagian utara merupakan bentang lahan struktural *denudasional* dengan topografi berbukit dengan kemiringan lereng curam, dan potensi air tanah kecil. Satuan dataran rendah, merupakan bentang lahan *fluvial* (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang dibagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai

Bantul yang berbatasan dengan pegunungan seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di parangtritis Bantul yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana, dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran *fluvial* yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya diwilayah *Aglomerasi* perkotaan Yogyakarta) adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju, dan berkembang.

Pada Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Progo di barat, dan DAS Opak-Oya di timur. Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

4. Data Demografi

Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program Keluarga Berencana.

Sementara upaya menurunkan kematian dilakukan dengan cara peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 3.594.854 orang pada tahun 2013.²

²Ibid hal 63.

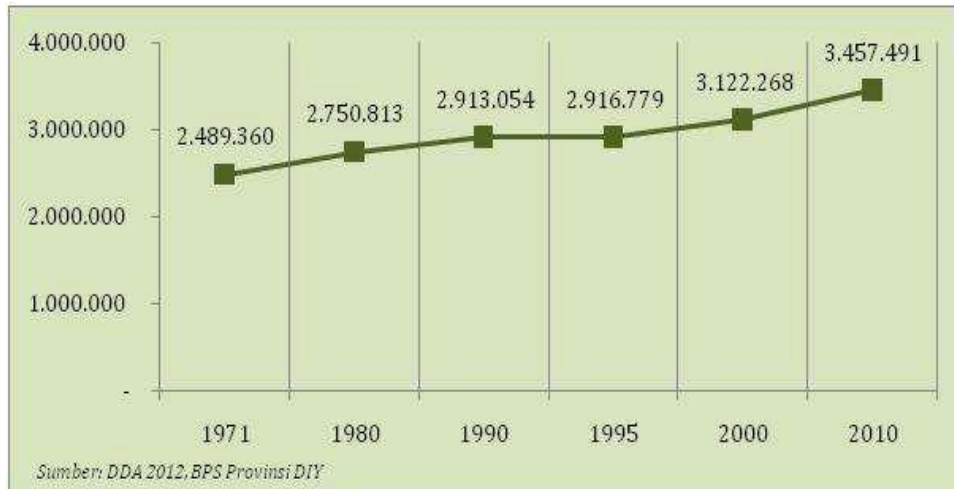
Tabel 2.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tahun/ Year	Uraian Description	Kabupaten/Kota / Regency/City					
		Kulon- progo	Bantul	Gunung- kidul	Sleman	Yogya karta	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2008	Jumlah/Total	385 937	886 061	675 471	1 054 751	390 783	3 393 003
	%	11,37	26,11	19,91	31,09	11,52	100,00
2009	Jumlah/Total	387 493	899 312	675 474	1 074 673	389 685	3 426 637
	%	11,31	26,24	19,71	31,36	11,37	100,00
2010	Jumlah/Total	388 869	911 503	675 382	1 093 110	388 627	3 457 491
	%	11,25	26,36	19,53	31,62	11,24	100,00
2011 ¹⁾	Jumlah/Total	390 207	921 263	677 998	1 107 304	390 553	3 487 325
	%	11,19	26,42	19,44	31,75	11,20	100,00
2012 ¹⁾	Jumlah/Total	393 221	927 958	684 740	1 114 833	394 012	3 514 762
	%	11,19	26 40	19 48	31 72	11 21	100,00
2013¹⁾	Jumlah/Total	403 203	947 066	700 192	1 141 684	402 709	3 594 854
	%	11,22	26,35	19,48	31,76	11,20	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035
Source : Indonesia Population Projection 2010-2035
Ket./Note : ¹⁾ Angka sementara/Preliminary figures

Gambar 2.1

Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk dan Sensus Penduduk Antar Sensus, 1971-2010



Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY

Kondisi tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.594.854 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.141.684 orang. Sementara itu Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 403.203 orang. Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2012 jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 50,57% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 49,43%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya seks ratio DIY sebesar 97,76% yang berarti bahwa terdapat sekitar 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Wilayah DIY yang memiliki seks ratio tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yaitu 100,53% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 93,69%.

Untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.³

Tabel 2.2
Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2012

Kabupaten/Kota	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Sex Ratio (%)
Kulon Progo	192.829	200.392	393.221	96,23
Bantul	462.793	465.158	927.956	99,49
Gunungkidul	331.220	353.520	684.740	93,69
Sleman	558.900	555.933	1.114.833	100,53
Kota Yogyakarta	191.759	202.253	394.012	94,81
DIY	1.737.506	1.777.256	3.514.762	97,76

Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY

5. Kondisi Politik dan Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang sangat menarik dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat dan budaya leluhur, hingga sistem pemerintahan daerahnya yang dijalankan berdasarkan sistem kerajaan atau keraton yang bersifat monarki konstitusional. Latar belakang keistimewaan tersebut dapat dilihat dari faktor sejarah tentang amanat Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII pada 5 September 1945 yang memuat bentuk dukungan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap berdirinya NKRI.

³ Rancangan kerja Pembangunan Daerah DIY 2015 hal 25.

Dari dukungan tersebut Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII memberikan syarat bahwa daerah Yogyakarta merupakan daerah yang istimewa dengan sistem kerajaannya dan kekuasaan dipegang sepenuhnya oleh kebudayaan sistem kerajaan yang telah melekat sejak masa penjajahan, yang selanjutnya mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun bentuk keistimewaan tersebut salah satunya adalah tentang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sebagaimana dimaksud BAB VI pasal 18 ayat 1 huruf C, bawa syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertahtakan sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.⁴

Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DIY tidak berlaku pemilihan secara langsung lewat mekanisme pemilihan umum dimana rakyat sebagai pemilihnya melainkan pengisian jabatan dilakukan dengan cara penetapan yang diatur secara khusus melalui undang-undang keistimewaan. Mengenai pengisian jabatan yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum hanya digunakan untuk memilih kepala daerah setingkat Kabupaten dan Walikota serta jabatan-jabatan Legislatif.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 *Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta* Bab VI Pasal 8 ayat 1 poin C.

Meski dalam amanat undang-undang keistimewaan rakyat tidak melibatkan dalam memilih Gubernur dan wakil Gubernur namun kehadiran peraturan ini dapat diterima dengan baik dalam kehidupan politik masyarakat DIY. Di sisi lain meski ada pembatasan hak pilih namun tingkat partisipasi masyarakat DIY dalam mengikuti pemilihan umum relatif cukup tinggi, terlihat pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih DIY mencapai 79,84% dengan pengguna hak pilih sebesar 2.245.164 dari 2.812.144 pemilih.

Tabel 2.3
Jumlah Pemilih DIY Pemilu 2014

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Kabupaten Kulonprogo	12	88	987	162.612	173.193	335.805
2	Kabupaten Bantul	17	75	2.294	349.518	369.501	719.019
3	Kabupaten Gunungkidul	18	144	1.898	288.604	305.995	594.599
4	Kabupaten Sleman	17	86	2.390	378.449	402.267	780.716
5	Kota Yogyakarta	14	45	953	147.231	158.693	305.924
	TOTAL	78	438	8.522	1.326.414	1.409.649	2.736.063

Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres Tahun 2009 lalu yang hanya mencapai angka 75,97%.⁵ Namun angka tersebut mengalami penurunan 0,2 persen dalam pemilihan Legislatif 2014 kemarin yang mencapai 79,85 persen.⁶ Berikut ini adalah

⁵<http://www.kpu.go.id,KPU-DIY-Selesaikan-Rekapitulasi-Pilpres-Dalam-Waktu-Dua-Jam>, Diunduh Pada sabtu 30 januari 2016 jam 06:12 WIB.

⁶<http://www.antaraneews.com/pemilu/berita/444815/partisipasi-pemilih-pilpres-di-diy-7985-persen> 31 januari 2016 jam 20.00 WIB.

rekapitulasi hasil perolehan suara dan kursi partai dalam pemilu
Legislatif tahun 2014 di Provinsi DIY.⁷

Tabel 2.4

Perolehan Suara Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif 2014.

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA							
		DPR PROV. DIY	DPRD PROV. DIY	DPRD KAB/KOTA					Jumlah YK 1+2+3+ 4+5
				Yk 1	Yk 2	Yk 3	Yk 4	Yk 5	
1	Partai NasDem	107.343	115.195	7.875	32.072	11.175	41.192	32.187	124.501
2	Partai PKB	129.943	211.690	3.214	57.523	28.312	73.120	30.746	192.915
3	Partai PKS	147.875	173.549	18.587	42.101	22.486	59.288	31.812	174.274
4	Partai PDIP	570.531	511.682	77.236	151.436	55.785	144.636	114.659	543.752
5	Partai GolKar	200.474	193.806	17.763	42.282	29.810	42.722	61.115	193.692
6	Partai Gerindra	244.144	256.409	26.959	75.514	33.367	75.175	49.633	260.648
7	Partai Demokrat	146.688	136.876	13.031	28.384	14.288	27.721	36.207	119.631
8	Partai PAN	366.787	282.207	30.952	69.635	45.618	86.795	61.953	294.953
9	Partai PPP	94.435	115.837	21.080	38.007	7.980	48.621	13.454	129.142
10	Partai Hanura	42.782	41.361	3.652	11.033	11.179	11.066	13.624	50.554
11	Partai PBB	14.162	13.683	1.237	11.102	1.292	3.642	5.267	22.540
12	Partai PKPI	5.199	6.079	1.051	1.638	455	818	2.504	6.466
	Jumlah Total	2.059.453	2.058.377	222.637	560.727	261.747	614.796	453.161	2.113.068

Keterangan:

Yk 1 : Kota Yogyakarta

⁷Ibid. Kpud-diyprov.go.id/pip diakses pada tanggal 1 Maret 2016.

Yk 2 : Bantul
 Yk 3 : Kulonprogo
 Yk 4 : Sleman
 Yk 5 : Gunungkidul

Tabel 2.5

Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN KURSI							
		DPR PROV. DIY	DPRD PROV. DIY	DPRD KAB/KOTA					Jumlah YK 1+2+3+4+5
				Yk 1	Yk 2	Yk 3	Yk 4	Yk 5	
1	Partai NasDem	-	3	1	2	1	5	2	11
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	5	-	4	5	5	3	17
3	Partai Keadialan Sejahtera	1	6	4	4	5	6	5	24
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	14	15	12	8	12	11	58
5	Partai Golongan Karya	1	8	5	5	5	4	6	25
6	Partai Gerindra	1	7	5	6	5	7	6	29
7	Partai Demokrat	1	2	1	1	2	1	4	9
8	Partai Amanat Nasional	1	8	5	6	7	6	7	31
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	2	4	4	1	4	-	13
10	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	-	1	-	1	2
11	Partai Bulan Bintang	-	-	-	1	-	-	-	1
12	Partai Keadialan Dan Persatuan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	8	55	40	45	40	50	45	220

Keterangan:

Yk 1 : Kota Yogyakarta

Yk 2 : Bantul

Yk 3 : Kulonprogo

Yk 4 : Sleman

Yk 5 : Gunungkidul

B. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Sejarah Partai

Kelahiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sangat berkaitan erat dengan kebijakan politik pada masa Orde Baru (ORBA). Strategi politik yang dijalankan oleh Orde Baru ibarat antitesa dari praktik pemerintahan Orde Lama. Pembangunan ekonomi yang dimasa orde lama terabaikan, ditempatkan sebagai prioritas dari kegiatan pemerintah, sementara disisi lain pembangunan politik ditekan semaksimal mungkin agar dapat menjadi jaminan stabilitas politik bagi pembangunan ekonomi. Pengalaman liberalisasi politik semasa Orde Lama yang justru memicu instabilitas politik disikapi oleh Orde Baru dengan mengintrodusir perubahan sistem kepartaian dan perubahan ini dilakukan secara drastis. Kecenderungan politik Orde Baru untuk menjinakkan dan melumpuhkan aktivitas Islam politik yang dipandang berbahaya dan latas semakin lama semakin menguat.

Partai PPP sendiri adalah partai jelmaan dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Ketika dideklarasikan, warna Islam yang menjadi

unsur dominan pembentuk partai ini tetap dipelihara untuk tetap menjaga kelestarian ukuah dan perjuangan Islam, partai-partai Islam yang berfusi tahun 1973 menerima Islam sebagai asas PPP, bahkan untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam gambar kabah yang diyakini sebagai kiblatnya umat Islam lalu diusung menjadi lambang partai.

Jika ditelusuri lebih dalam pengalaman politik Partai PPP sudah dirintis sejak lama, hal ini dapat dilihat dari hasil fusi politik empat partai Islam yang meleburkan diri kedalam PPP. Seperti partai Nadhlatul Ulama yang secara formal partai NU berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai organisasi keagamaan dengan faham *Ahlussunnah wal Jammaah* yang bergerak dibidang keagamaan. Kendati bergerak sebagai organisasi dibidang keagamaan peran politik NU terutama dalam membangkitkan semangat perlawanan terhadap belanda sangat berpengaruh pada masa itu. Orientasi politik NU muncul secara terbuka ketika organisasi ini tergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) tahun 1939 yang bertujuan untuk memperkuat tali persatuan umat Islam Indonesia yang pada masa pendudukan Jepang MIAI diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang isinya antara lain pememerintah mengizinkan rakyat untuk mendirikan partai politik dalam rangka menyalurkan segala paham dalam masyarakat.

Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh wakil Presiden Muhammad Hatta tersebut, pada tanggal 8 November 1945 tokoh-tokoh umat Islam langsung mendeklarasikan berdirinya partai Masyumi, partai ini berbeda dan terlepas sama sekali dengan nama organisasi Masyumi yang ada pada masa penjajahan Jepang. Sebagai organisasi konfederasi kedudukan kelompok-kelompok Islam yang tergabung dalam partai Masyumi sangat rawan konflik, pembagian peran dalam struktur organisasi yang menempatkan tokoh-tokoh NU pada posisi kurang bergengsi mengakibatkan kekecewaan bagi kelompok NU, hal ini yang selanjutnya membuat tokoh NU kecewa lalu menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai Nahdhatul Ulama pada tanggal 15 April 1952.

Ketika Masyumi masih menjadi induk gerakan politik Islam di Indonesia, peran kelompok Serikat Islam (SI) tidak terdengar sama sekali, bahkan para tokoh SI tidak diberikan ruang berperan banyak dalam pengambilan keputusan politik di Masyumi. Baru pada tahun 1947 suara SI mulai terdengar ketika para tokoh yang ada pada Masyumi keluar dan mendirikan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) transformasi dari organisasi Serikat Islam bentukan HOS Tjokroaminoto pada 1912 yang pada awalnya SI sendiri merupakan kelanjutan dari Serikat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk Sumahudi pada tahun 1905. Perubahan nama SDI menjadi SI menandai perubahan orientasi dalam hal politik ditubuh gerakan SDI pada masa itu.

Sedangkan partai Perti, sebetulnya cikal bakal dari pergerakan Tarbiah Islamiah (Perti) yang didirikan pada 1930 di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Awalnya organisasi ini merupakan organisasi sosial yang bergerak dibidang pendidikan dan agama. Pilihan organisasi Perti mengubah dirinya menjadi organisasi partai politik karna adanya hubungan kurang harmonis dengan Majelis Islam Tinggi (MIT), yang merupakan sebuah partai politik Islam di Sumatra Barat yang kemudian berubah membentuk Masyumi. Dengan perubahan organisasi sosial menjadi organisasi politik para tokoh Perti beranggapan bahwa paham keagamaan mereka akan lebih mudah dipertahankan dan diperjuangkan nantinya.

Terahir adalah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Parmusi secara formal didirikan pada tahun 1968, diprakasai oleh berbagai organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sebagai besar pembukanya berasal dari anggota-anggota Masyumi yang ketika pada pemerintahan Presiden Sukarno Masyumi dibubarkan karna dianggap terlibat pemberontakan di daerah-daerah pada masa itu.

2. Jati Diri Partai

Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata'ala.⁸ Termasuk penegasan dalam Visi-Misi dan

⁸ Anggaran Dasar partai PPP, Bab II, Pasal 5 tentang tujuan dan usaha.

cita-ciyanya PPP bercita-cita merealisasikan apa yang diamahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.⁹

Maka dari itu PPP dalam visinya merumuskan tujuan perjuangan dalam beberapa aspek antara lain tentang kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, PPP memperjuangkan terjaminnya kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 sesuai dengan prinsip ajaran Islam *lakum diinukum waliyadain* (bagimu agamamu, bagiku agamaku).

Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab yang dilandasi dengan nilai-nilai *akhlaqa karimah* (akhlak mulia). PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain. Dalam kehidupan berpolitik, PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika

⁹<http://ppp.or.id/page/jati-diri-ppp/index/> di unduh pada tanggal 5 Desember 2015, jam 19.00 wib.

politik perlu ditegakkan, hak-hak politik rakyat yang dijamin UUD 1945 perlu dihargai dan dilindungi, termasuk penyaluran aspirasi politiknya. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwa demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan atas dasar negara hukum (*rechstaat*) dan bukan atas dasar negara kekuasaan (*machstaat*). Kekuasaan harus dibatasi dengan penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita-citakan tegaknya asas demokrasi ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi haruslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Dalam kaitan itu, tatanan ekonomi yang berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian dan dalam pelaksanaanya harus dicegah timbulnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat monopoli dan konglomerasi yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional harus dihindarkan sehingga kesejahteraan yang lebih merata dapat diwujudkan. Harta kekayaan tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Dalam hubungan ini lembaga-lembaga ekonomi, keuangan, dan

perbankan serta pranata-pranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorong pengembangannya. Usaha-usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum dari kalangan yang berhasil secara ekonomis perlu dilakukan secara terus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah. Karena, dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan harkat dan martabatnya. Upaya tersebut harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuh kembangkan budaya saling harga menghargai dan saling sayang menyayangi yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (*ukhuwwah*), dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan pendapat dikalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai rahmat. Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan sejalan dengan *sunnatullah*, PPP mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan gender. PPP berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berkualitas tinggi, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

3. *Khitthah* Ideologi Partai

Partai PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah *Subhanahu wa T'a'ala* kepada umat manusia dimuka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (*ad-dien*) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna diantara ciptaan-Nya. Islam sebagai *ad-dien* merupakan sekumpulan perintah dan larangan (*syariat*) yang mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (*rahmatan lil 'alamiin*).

Keyakinan terhadap universalitas Islam menuntut keharusan untuk meyakini adanya satu-satunya kebenaran yang mutlak dalam ajaran Islam dan pengakuan terhadap kemampuan ajaran Islam untuk diterapkan oleh siapa pun dan dimanapun serta dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Keyakinan terhadap universalitas Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai ajaran Islam sebagai tolok ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala sesuatu. Keyakinan terhadap universalitas Islam juga menuntut keharusan untuk menerapkan nilai ajaran Islam

dalam segala aspek kehidupan serta menolak segala sesuatu yang diyakini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁰

PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan *wasilah* bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (*ukhuwah*), tolong menolong (*ta'awun*), dan toleransi (*tasamuh*). PPP menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata *ijtihad* yang memungkinkan terjadinya perbedaan.

Untuk hal tersebut sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (*tasamuh*). Sikap itu juga merupakan egoisme (*ananiyyah*) dan fanatisme kelompok (*ananiyyah hizbiyyah*) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (*al-'adawah*), pertentangan (*al-tanazu'*), dan perpecahan (*al-insyiqaq*). PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan *ahlussunnah wal jama'ah* dalam arti luas. Yaitu suatu paham

¹⁰<http://pppbabel.com/organisasi/khittah> Diakses Pada 12 Desember 2015 Jam 06.47 WIB.

keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta *salaf as-sholeh*.

Paham keagamaan Islam *ahlus sunnah wal jama'ah* adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), menjaga keseimbangan (*tawazun*), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (*rahmatan lil 'alamiin*). Paham keagamaan *ahlussunnah wal jama'ah* menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (*tatharruf*), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar sebuah tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (*ideological party apparatus*) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan *shibghah* (identitas) partai yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan

tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan *marwah* agama Islam.

4. Visi Dan Misi¹¹

Visi

Terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridha Allah Subhanahu Wata'ala.

Misi

1. Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/ leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama.
 - b. Menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah insaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme,

¹¹ AD-ART PPP Bab III *Tujuan Dan Usaha Partai Pasal 5 dan 6.*

liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan (*Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan – 72*).

- c. Memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika.
- d. Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat.
- e. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai oleh Allah Subhanahu Wata'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai.
 3. Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional.
5. Struktur Pengurus Organisasi dan Daftar Nama Caleg

Tabel 2.6
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan
Pembangunan Masa Bakti 2014-2019.¹²

Pengurus Harian	Nama Pengurus
Ketua Umum	Ir. H. M. Romahurmuziy, MT.
Wakil Ketua Umum Bidang Internal	H. Emron Pangkapi
Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu	H. M. Mardiono
Wakil Ketua Umum Bidang Eksternal	Dra. Hj. Ermalena Muslim
Ketua	
Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	Drs. H. Isa Muchsin
Bidang Politik dan Pemerintahan	H. Rusli Effendi, SE, SPd.I, M.Si.
Bidang Hukum dan HAM	H.M. Sholeh Amin, SH, M.Hum.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 1 Sumbagut	H. Fadly Nurzal, S.Ag.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 2 Sumbagsel	H. Rahman Yakob, S.Sn, M.Sn.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 3 Jawa Bag. Barat	Drs. H. Husnan Bey Fananie, MA.

¹²<http://ppp.or.id/page/pengurus-harian-dpp-ppp-/index/> Diakses Pada jum'at 23 Desember 2015 Jam 01.31 WIB.

Bidang Pemenangan Pemilu Wil 4 Jawa Bag. Timur	Drs. H. Mahmud Yunus
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 5 Kalimantan	H. Ahmadi Usman, S.Ag.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 6 Sulawesi	H. Amir Uskara, M.Kes.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 7 Bali – Nusra	H. Ahars Sulaiman, SH, MH.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 8 Maluku – Papua	H. Bachtiar Gaffar, S.Si.
Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri	H. Usman M. Tokan, SE, MBA.
Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	H. M. Rudy Ariffin
Bidang Industri dan Perdagangan	Dr. Hj. Ariza Agustina, M.Si.
Bidang Infrastruktur dan Perumahan	H. Iskandar D. Syaichu
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	H. Achmad Farihal
Bidang Agama dan Dakwah	Hj. Hizbiyah Rohim, S.Sos.
Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Dra. Hj. Okky Asokawati
Bidang Pemberdayaan Perempuan	Dra. Hj. Siti Nurmila Muslih
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dr. Hj. Reni Marlinawati
Bidang Pemuda dan Olahraga	H. Joko Purwanto
Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rudiman, SH.
Bidang Kewirausahaan	Drs. H. Asgar Ali Djuhaepa, MM,MBA.
Bidang Pengabdian Masyarakat	H. Yusroni Yazid, SE, MM.

Bidang Hubungan Antar Lembaga	H. M. Arwani Thomafi, S.Ag.
Bidang Penguatan Ideologi	H. Yahidin Umar
Bidang Komunikasi dan Hub. Media	Prof. Dr. Arman Remy, SH., MH.
Bidang Informasi dan Teknologi	Ir. Sigit Hariyanto, M.Sc.
Bidang Optimalisasi Aset	H. Hasan Husaeri Lubis
Bidang Pertahanan dan Keamanan	H. Salman El Farisiy Syamlan, SH.
Sekretaris Jenderal	Ir. H. Aunur Rofiq
Wakil Sekretaris Jenderal	
Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi	Ir. M. Qoyyum Abdul Jabbar, M.Si.
Bidang Politik dan Pemerintahan	M. Z. Amirul Tamim, SH.
Bidang Hukum dan Ham	Dr. Arsul Sani, SH., MH.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 1 Sumbagut	H. Amri M. Ali.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 2 Sumbagsel	H. Ihsan Nahromi, Lc., MA.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 3 Jawa Bag. Barat	Doni Ahmad Munir, ST., MM.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 4 Jawa Bag. Timur	Drs. H. Choirul Sholeh Rasyid
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 5 Kalimantan	Hj. Kasriyah
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 6 Sulawesi	Sitti Marijam Thawil, SE., MM.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 7 Bali – Nusra	Syafa Iliyyin, SE.
Bidang Pemenangan Pemilu Wil 8 Maluku – Papua	M. Syahril Wasahua, S.HI., MH.
Bidang Hubungan dan Kerjasama	H. Andi Surya Wijaya, SH.

Luar Negeri	
Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	H. Achmad Mustakim, SE.
Bidang Industri dan Perdagangan	H. Mukhlisin
Bidang Infrastruktur dan Perumahan	H. Gede Widiade, SH., MBL.
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dra. Hj. Tati Hartati
Bidang Agama dan Dakwah	KH. Muslih ZA
Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Hj. Fatmawati Rusdi, SE.
Bidang Pemberdayaan Perempuan	Dra. Hj. Ayu Uke Oktarina Afero
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Siti Yulia Irfany Sarifuddin, SH., M.Kn.
Bidang Pemuda dan Olahraga	Dra. Hj. Wardatun Na'im
Bidang Ekonomi dan Keuangan	H. Bambang Hermanto, SE.
Bidang Kewirausahaan	Hj. Zunnatul Mafrucah, SH.
Bidang Pengabdian Masyarakat	Hj. Etha Aisyah Hentihu
Bidang Hubungan Antar Lembaga	Hilman Ismail Metareum, SE.
Bidang Penguatan Ideologi	Dra. Hj. Lena Maryana Mukti
Bidang Komunikasi dan Hubungan Media	Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
Bidang Informasi dan Teknologi	Ir. Dini Mentari
Bidang Optimalisasi Aset	Arya Permana Graha, S.I.Kom.
Bidang Pertahanan dan Keamanan	H. Gugus Joko Waskito, SE., MM.
Bendahara Umum	Hj. Nurhayati
Wakil Bendahara	Hj. Rani Anggraeni Safitr, SE

Tabel 2.7

Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan
Pembangunan Provinsi D. I. Yogyakarta Masa Bakti 2011-2016.¹³

Jabatan	Nama
Ketua	H. M. Syukri Fadholi, SH.
Wakil Ketua	Drs. H. Abdulah Efendi
Wakil Ketua	Drs. H. Muslih Ilyas
Wakil Ketua	H. M. Yazid, S. Ag.
Wakil Ketua	H. M. Dawam karsahutama. MBA.
Wakil Ketua	Hj. IdaFatimah ZA, S,Ag, M.Si.
Wakil Ketua	Sunardi, BA.
Wakil Ketua	Drs. Maksun Amrullah
Wakil Ketua	Hj. Zanatul Mufruchah, SH.
Wakil Ketua	H. M. Rozi Amin
Sekretaris	Mahmud Al Harisi, S.Ag.
Wakil Sekretaris	Drs. H. Ady Susilo
Wakil Sekretaris	Drs. H. Imam Muharror, M.Hum. MM
Wakil Sekretaris	Bambang Aris Sudjoko
Wakil Sekretaris	Hasanuddin Nur Taji
Wakil Sekretaris	Hj. Titik Yudhawati, SH.
Wakil Sekretaris	H. Budi Rahono, S.IP.
Wakil Sekretaris	Siti Akiyah Vitayati, S.Pdi.
Wakil Sekretaris	H Badrussalam
Wakil Sekretaris	Hj. Nur Hilda, SH
Bendahara	H. Mahyudin Al-Mudra, SH, MM.
Wakil Bendahara	Hj, Itje Soraya, SE.
Wakil Bendahara	Dra. Hj. Siti Nurjanah

¹³http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Prov_DIY24072015.pdf. Diakses pada 23 Desember 2015
Jam 2.00 WIB.

Tabel 2.8

Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi
D. I. Yogyakarta Masa Bakti 2011-2016

Jabatan	Nama
Ketua	Umar Sanusi, HP.
Wakil Ketua	H. Umar Said, S. Ag.
Wakil Ketua	Hj. Marfuah Jamal
Wakil Ketua	H. Murmadi AR.
Wakil Ketua	H. Djamil Mahmudi, SH.

Tabel 2.9

Susunan dan Personalia Pimpinan Majelis Pakar Wilayah Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi D. I.
Yogyakarta Masa Bakti 2011-2016

JABATAN	NAMA
Ketua	H. M. Alfian Darmawan
Wakil Ketua	Drs. H. Muslih SF.
Wakil Ketua	Drs. H. Imam Mujiono, MA.
Wakil Ketua	Johan Erwin. SH. M. Hum
Wakil Ketua	Dwijo Suyono, S.Sn.

Tabel 2.10

Daftar Nama Caleg DPRD I Provinsi Partai NasDem dan Hasil Rekapitulasi
Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat.¹⁴

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara							Total
	DIY 1	DIY 2	DIY 3	DIY 4	DIY 5	DIY 6	DIY 7	
1. Partai NasDem	1,961	3,784	4,489	2,921	4,787	4,193	9,574	31,709
Dapil: DIY 1								
1 Drs. AULIA REZA BASTIAN, M. Hum.	1,414							1,414
2 Dra. ERNI FEBRUARIA, M. Si.	607							607
3 Drs. WIBISONO JOKO HARTONO, MBA.	264							264
4 Dra. YULIANI	318							318
5 H. MUHAMMAD BS.	190							190
6 MUHAMMAD HARYO SUBODRO, BSc.	166							166
7 HENI NURVITA, S.P., M.M.	211							211
Dapil: DIY 2								
1 Drs. SETI WIDODO		2,062						2,062
2 TUTIK YANUARTI		7,633						7,633
3 DIDA NURSAIDA		154						154
4 SURADJI, S.H.		238						238
5 CHRISPINA L.C WIDYASTANTRI, S.T.		150						150
6 TEGUH HARTONO, S. Sos.		143						143
7 SINGGIH MARYANTO, B.A.		128						128
Dapil: DIY 3								
1 SURYO PUTRO NUGROHO			6,304					6,304
2 Drs. H. ALIYANTO, M.Pd.			1,226					1,226
3 AYU PUSPITA ARRY ROCHMA NIDICI			286					286
4 R. SURYO HARDIHANDOYO, S.Sn.			397					397
5 Drs. MAHIDIN ATIEN DESKY, S.H.			122					122
6 RIRIN SULYANI, S.E., Akt.			226					226
Dapil: DIY 4								
1 drh. SABAR WIDODO				2,430				2,430
2 H.M. R. DANU WASKITO SHW.				894				894
3 ALIFAH NOOR RACHMAH ELVISTASARI				199				199
4 DANY DWIASTUTI ARINI				551				551
5 ROSALIA ENDAH WIDIASTUTI, S.H.				146				146
6 SUKIJAN				656				656
7 Drs. HERI PURWANTO				189				189
Dapil: DIY 5								
1 WISNU AJI SURYA PRABOWO, S.IP.					7,376			7,376
2 SUBARNO					10,291			10,291
3 Rr. AG. GIYANTI TITIK WARDANI, S.Pd., M.Pd.					623			623

¹⁴ Data Hasil Pemilu 2014 DIY Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD DIY Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014.

4	ROHMAT KUSNADI					423			423
5	DEWI MAHARANI					240			240
6	ADI HERYADI, S.Psi., M.Psi.					154			154
7	Drs. SUTRISNO, M.A.					326			326
8	ANINDITA SARI KUSUMASTUTI, S.H.					209			209
9	AGUS BUDI RACHMANTO, S.IP., M.Si.					161			161
	Dapil: DIY 6								
1	AMIN ZAKARIA, S.E., S.H., M.Si.						2,180		2,180
2	CORNUS DWISAPTHA HEKSEKO, S.Sos.						415		415
3	SINTA KUSUMANINGRUM						3,782		3,782
4	DWI MARCHAYATUN						368		368
5	YATIMAN, S.H.						408		408
6	SRI BUDYARTATI, S.S., M.Pd.						283		283
7	SAMBUDI, S.T.						4,354		4,354
8	H. SUDIBYO, S.T.						339		339
	Dapil: DIY 7								
1	SUPARJA, S.IP.							12,506	12,506
2	SUNARDI, S.Pd.							5,032	5,032
3	ENDANG SUKMARANINGSIH							1,129	1,129
4	R.H. HERU WAHYU KISMOYO, S.Sos., M.Si.							883	883
5	BENI SUNTOKO, S.E.							3,161	3,161
6	MARIYA GORETI HARTINI							516	516
7	MUHAMMAD FAKHRUR ROZY							340	340
8	BAYU SUSANTO, S.E.							164	164
9	YULIA WAHYUNINGRUM							303	303
10	EXVAN DWI EFFENDI							92	92
11	IKA WAHYUNI							124	124
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	5,131	14,292	13,050	7,986	24,590	16,322	33,824	115,195

C. Partai Nasional Demokrat (NasDem)

1. Sejarah Partai

Pada dasarnya kelahiran partai Nasional Demokrat (NasDem) sangat berkaitan erat dengan organisasi kemasyarakatan yang bernama Nasional Demokrat yang resmi berdiri pada tanggal 1 februari 2010 di Jakarta. Berdirinya organisasi kemasyarakatan ini digagas oleh Surya Paloh dan Sri Sultan HB X beserta tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang seperti: Ahmad Syafii Maarif, Anis Baswedan, Khofifah Indarparawansa, Siswono Yudohusodo, Ferry Mursyidan Baldan, Syamsul Mua'rif, Didiek J. Rachbini, Budiman Sujatmiko, Patrice Rio Capella, Akbar Faisal dan Enggar Tyasto Lukito adalah berbagai tokoh yang juga turut mendeklarasikan kelahiran organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat.

Pada awalnya organisasi ini membawa spirit perubahan yang cukup memikat masyarakat khususnya anak muda. Dengan mengusung gagasan tentang Gerakan Restorasi Indonesia Ormas Nasional Demokrat mampu berkembang secara cepat dan lebih mudah diterima dikalangan masyarakat luas. Gerakan Restorasi Indonesia tidak lain adalah gerakan untuk memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan berbangsa, seta ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹⁵

Pendeklarasian NasDem ditandai dengan pidato dan penandatanganan oleh Surya Paloh di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Gerakan organisasi ini dilandaskan atas tiga hal yaitu:

- 1) Membangun politik solidaritas yaitu: Menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional (melalui jalur partai politik dan non-partai politik), memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat dan bukan alat kekuasaan, negara-bangsa dan negara konstitusional yang kuat.
- 2) Menggerakkan ekonomi emansipatif dan partisipatif yaitu: menggerakkan potensi manusia yang produktif (perluasan kesempatan lapangan kerja, kemampuan kewirausahaan dan akses permodalan, khususnya dipertanian, pedesaan, dan maritim, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam secara bergotong-royong, bernilai tambah, dan berwatak nasional, keberpihakan kepada UMKM, serta restorasi industri dasar dan industri olahan.
- 3) Menumbuh kembangkan budaya gotong royong yaitu: Merestorasi pendidikan karakter bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, kebebasan berekspresi, solidaritas sosial (tolong-

¹⁵<http://www.antaraneews.com/pemilu/berita/423235/profil-partai-nasional-demokrat-NasDem>
Diakses Pada 30 Desember 2015 Jam 07.35 WIB.

menolong), penghargaan terhadap budaya lokal, membangun ilmu pengetahuan berbasis warisan budaya bangsa, memajukan teknologi tepat guna, dan kelestarian ekologi.

Selain tiga penegasan di atas organisasi ini juga mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri.

Walaupun pendeklarasian organisasi ini dilakukan oleh berbagai tokoh, namun pada dasarnya ide awal organisasi ini lebih banyak diinisiasi oleh Surya Paloh. Gagasan pendirian organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat muncul tak lama setelah kekalahan Surya Paloh dalam perebutan kursi ketua umum Partai Golkar yang dilaksanakan di Pekanbaru pada tahun 2009 silam. Terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Golkar periode 2009-2014 sepertinya membawa kekecewaan yang mendalam bagi Surya Paloh hingga setelah peristiwa tersebut Surya Paloh yang didukung oleh sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang mendirikan organisasi kemasyarakatan yang bernama Nasional Demokrat (NasDem).

Sejak dideklarasikan, dari hari kehari ormas Nasional Demokrat kian menunjukkan eksistensinya, bahkan dalam waktu yang relatif singkat NasDem telah berhasil membuka cabang di hampir seluruh daerah di Indonesia. Setelah NasDem kuat secara organisasi, memunculah orientasi kekuasaan di dalam internal Ormas NasDem dengan bekal popularitas dan struktur organisasi yang terbentuk hingga tingkat cabang akhirnya

organisasi Nasional Demokrat bertransformasi menjadi partai politik ditandai dengan deklarasi Partai NasDem yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 26 Juli dan didaftarkan ke departemen hukum dan HAM pada 27 Juli 2011.

Dampak dari berubah orientasi tersebut, Partai NasDem harus mengalami masa-masa sulit karna ditinggalkan oleh salah satu insiatornya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta non aktifnya beberapa deklaratornya seperti Khofifah Indarparawansa, Anies Baswedan, Ahmad Syafii Maarif, Didik J. Rachbini, dan Budiman Sudjatmiko serta pengurus-pengurus daerah lainnya. Sebabnya adalah dalam perjalanan membangun dan memperkuat Ormas Nasional Demokrat kemudian lahir Partai NasDem yang mempunyai tujuan, ide dan gagasan yang sama dengan Ormas NasDem serta sekretariat di alamat yang sama pula. Selain itu dimata Sri Sultan Hamengkubuwono X, perubahan tersebut adalah penyimpangan dari komitmen perjuangan karena partai politik akan berorientasi pada kekuasaan.

Peristiwa tersebut menjadi ujian pertama dalam pendirian Partai NasDem, bahkan dalam dinamikanya terjadi fragmentasi di dalam tubuh Ormas Nasional Demokrat dalam menentukan sikap terhadap pembentukan Partai NasDem. Ada tiga opsi yang muncul dalam fragmentasi tersebut antara lain:¹⁶ Pertama, opsi yang menginginkan Ormas NasDem untuk tetap pada bentuknya dan tidak dalam posisi

¹⁶http://www.kompasiana.com/moch.eksan/NasDem-sebagai-ormas-dan-partai-politik_5500f5a0a333115b74512448 Diakses pada 1 Januari 2016 jam 7.48 WIB.

berpolitik praktis, hal ini menyangkut dengan peran dan tujuan dari sebuah gagasan besar restorasi tidak diukur dalam keterlibatannya di dalam hiruk-pikuk politik praktis namun akan lebih baik dalam Ormas.

Sedangkan yang kedua adalah opsi supaya Ormas seutuhnya terlibat dalam politik dengan mentransformasikan lembaganya sebagai partai politik secara utuh. Alasan yang mendukung opsi kedua ini berdasarkan sebuah keyakinan bahwa gerakan restorasi Indonesia akan lebih mudah terwujud melalui kekuasaan. Ketiga adalah opsi yang dianggap sebagai akomodatif. Opsi ini menekankan penyatuan kubu yang setuju membentuk partai dan yang tidak untuk kemudian melebur menjadi kesatuan Ormas Nasional Demokrat dan menyepakati pula adanya gagasan untuk mengeksekusi nilai-nilai ideologi restorasi dalam bentuk partai politik. dengan kata lain, opsi ketiga ini menyebutkan bahwa Ormas tetaplah Ormas dan Partai NasDem sebagai entitas yang berbeda dari Ormas.

Walaupun ada fragmentasi, NasDem yang telah bertransformasi menjadi partai politik masih tetap mendapatkan simpati dari masyarakat lewat perkenalannya sebagai partai politik baru yang disiarkan lewat stasiun-stasiun televisi. Gelombang massa yang menjadi anggota baru baik ditingkat pusat sampai daerah tidak terbendung lagi karena adanya antusiasme masyarakat semakin tinggi. Dalam misinya Partai NasDem mendefinisikan sebagai sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh proklamasi

1945 belum terwujud hingga saat ini. Karenanya Partai NasDem hadir bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat guna melakukan gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia.

Kehadiran Partai NasDem sebagai partai politik baru ingin melakukan restorasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dimana butuh melakukan restorasi diseluruh lini kehidupan. Seperti restorasi konstitusi, restorasi sistem politik, dan restorasi ekonomi. Ditengah praktek politik transaksi, politik citra, politik mahar, politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk dalam panggung kehidupan demokrasi, ditengah krisis kepercayaan rakyat terhadap partai lama, maka Partai NasDem hadir untuk menggelorakan semangat dan harapan bahwa perubahan harus terjadi.

2. Manifesto Partai

Adapun manifesto perjuangan Partai NasDem adalah sebagai berikut:¹⁷ Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meletakkan dasar penting lahirnya sebuah bangsa besar, Bangsa Indonesia. Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang dimaksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon politik, indah didengar namun tak pernah mewujud. Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban

¹⁷ AD-ART Partai Nesdem tentang Manifesto Partai NasDem.

untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut bangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas kemana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. NasDem menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. NasDem menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani.

NasDem menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. NasDem menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara. NasDem mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Partai NasDem mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri.

Partai NasDem berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi, yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara.

Partai NasDem berdiri untuk membangun politik warga negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong. Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. NasDem mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip bhinneka tunggal ika. Partai NasDem lahir sebagai sebuah keharusan sejarah. NasDem lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pasca reformasi.

NasDem berdiri tegak, dengan semangat kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat. Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional. Dari penafsiran manifesto tersebut dan seperti yang tercantum dalam anggaran dasar Partai NasDem pada pasal 2 tentang asas partai, dapat disimpulkan bahwa Partai NasDem merupakan partai politik yang berideologi nasionalis yang bertumpu pada semangat gerakan merestorasi Indonesia.

3. Garis Perjuangan Partai

Partai NasDem lahir dari perwujudan dari rasa nasionalisme kebangsaan, dan kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki artabat dalam pergaulan internasional. Maka dari itu Partai NasDem sebagai gerakan perubahan yang menggagas gerakan restorasi Indonesia, mencoba memetakan garis perjuangan partai yang berisikan muatan sebagai berikut:¹⁸

- a. Partai NasDem adalah alat perjuangan baru agar demokrasi di Indonesia menemukan kesejatiannya, dan bukan sekadar praktek formal prosedural semata. Demokrasi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tanpa menjadikan rakyat sejahtera, demokrasi ibarat pohon yang berbunga tetapi tanpa buah. Indah dipandang tetapi tak dapat dinikmati. Demokrasi yang menghasilkan kekacauan juga bukanlah tujuan Partai NasDem.
- b. Partai NasDem adalah universitas bagi setiap kadernya. Partai NasDem akan mengirim kaderkader terbaiknya ke pelosok nusantara untuk bersama-sama rakyat menyelesaikan persoalan rakyat. Kader Partai NasDem adalah kader yang ditempa untuk hidup, makan, dan berjuang bersama rakyat, bukan kader yang

¹⁸ Ibid AD-ART Partai NasDem.

manja, korup, elitis dan terasing dari rakyatnya. NasDem juga bukanlah partai masa lalu yang hanya bicara masa lalu, melainkan partai masa depan yang akan selalu hadir 24 jam di tengah rakyat, bukan jenis partai yang hadir hanya saat menjelang pemilu.

- c. Partai NasDem berprinsip untuk tidak pernah mengharapkan bangsa lain datang dan membantu bangsa ini untuk menyelesaikan seluruh kesulitan yang ada. Namun sebaliknya, Partai NasDem berprinsip bangsa Indonesia sendirilah yang harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu Partai NasDem akan mengembalikan kemandirian bangsa dalam wilayah ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, juga berdaulat dalam politik dan perubahan itu mulai dari internal partai.
- d. Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat ini. Partai NasDem bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

- e. Mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama yang coba akan dituangkan melalui: Satu, restorasi negara-bangsa berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong-royong sesuai dengan dasar negara dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kedua, restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, spiritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif. Ketiga, restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.
- f. Dalam usaha merealisasikan poin-poin perjuangan tersebut, Partai NasDem akan mengabdikan diri sebagai sahabat sejati kekuatan petani, nelayan dan usaha kecil menengah sebagai basis ekonomi nasional yang akan diwujudkan dalam program prioritas partai. Meliputi tiga bidang yaitu: Basis pertanian yang kuat, ekonomi maritim yang terpadu, dan Indonesia yang terhubung dari ujung Timur sampai Barat melalui Trans Indonesia (infrastruktur). Partai NasDem juga akan memfasilitasi kekuatan lintas sektor petani, nelayan, dan buruh dengan segenap pasar nasional dan internasional untuk bersama-sama memajukan

sektor pertanian dan kelautan, menjembatani terjadinya kemitraan antara pengusaha-pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dimana pengusaha besar akan menjadi pengasuh bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk bersama-sama memajukan perekonomian nasional. Program prioritas ini dicanangkan sebagai jawaban Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera.

4. Visi Dan Misi¹⁹

Visi

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Misi

- a. Membangun politik demokratis berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu

¹⁹ Ibid, Visi-Misi Partai NasDem, Pasal 4 dan 5.

sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.

- b. Menciptakan demokrasi ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.
- c. Menjadikan budaya gotong-royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global

5. Struktur Organisasi dan Daftar Nama Caleg

Tabel 2.11

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat.²⁰

Ketua Umum	Surya Paloh
Ketua Bid Pemilihan Umum	Ferry Mursyidan Baldan
Ketua Bid Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi	Sugeng Suparwoto
Ketua Bid Media & Komunikasi Politik	Sri Sajekti Sudjunadi
Ketua Bid Pendidikan Politik & Kebudayaan	Dr. Silverius Sonny Y. Soeharso
Ketua Bid Politik dan Pemerintahan	Akbar Faizal
Ketua Bid Hukum, Advokasi & HAM	Taufik Basari
Ketua Bid Otonomi Daerah	Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.
Ketua Bid Pertanian & Maritim	Victor Laiskodat, SH, MH
Ketua Bid Pertahanan & Keamanan	Martin Manurung, SE, MA
Ketua Bid Energi, SDA & Lingkungan Hidup Ketua Bid Agama & Masyarakat Adat	Dr. Kurtubi
Ketua Bid Hubungan Luar Negeri	Hasan Aminudin
Ketua Bid Ekonomi & Moneter	Enggartiaso Lukita
Ketua Bid Kesehatan, Perempuan & Anak	Dr. Anthony Budiawan
Ketua Bid Industri, Perdagangan & Tenaga Kerja	Irma Chaniago

²⁰<http://www.merdeka.com/politik/ini-susunan-lengkap-pengurus-partai-NasDem.html> Diakses Pada 1 Januari 2016 Jam 8.30 WIB.

Ketua Bid Olahraga, Pemuda & Mahasiswa	Zulfan Lindan
Sekretaris Jenderal	Nining Indra Shaleh
Wasekjen Bid Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi	Willy Aditya, S.Fil, MDM
Wasekjen Bid Internal & Kesekretariatan	Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si
Ketua Dewan Pakar	Dedy Ramanta, SH
Wasekjen Bid Eksternal	Siar Anggretta Siagian, M.Si
Bendahara Umum	Frankie Turtan
Waben Bid Penggalangan Dana	Guntur Santosa
Waben Bid Pengelolaan Aset	Joice Triatman
Wasekjen Bid Renlitbang	Bachtiar Aly
Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi:	Ir. Ristiyanto
	Ida Halimah, M.Kes
	Andreas Ambessa
	Media dan Komunikasi Publik:
	Legiman Misdiyono
	Drs Despen Ompusunggu
Departemen Pendidikan Politik dan Kebudayaan	Sri Unggul Azul Safri
	Welnaldi
	Ir Ari Putra Bintana
	Ir Wismen A Razak, M.Si
	Politik Pemerintahan:
	Eko Suryo Sancoyo
	Dumoli Simanjutak
Agandha Armen	
Departemen Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia	Wibi Andrino
	Sri Hartati Rahayu, SH, LLM

	Gloria Rusmiputro, SH
	Otonomi Daerah:
	Hamdani
	Ir Edward Sihombing
	Dr Atang Irawan
Departemen Energi, SDA, dan LH	Joni F
	Yayan A
	Fransiska Endang
Departemen Agama dan Masyarakat Adat	Fitri Ani G
	Rizki W
	David K

Tabel 2.12

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Dememokrat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²¹

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah	H. Subardi, SH,MH
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum	Fidelis Indriarto S. Si. MM
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan	Subarno
Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi	Abulaka Archaida, S. Sos
Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik dan Budaya	R. Giyanti Titik Wardani, S.Pd. M. Pd
Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan	Sudiyo, S. Ag. M Pd
Wakil Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan Hak Asasi Manusia	R. Hery Sartana, SH

²¹SK, No: 019-SK/DPP-NasDem/II/2016.

Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah	Sambudi. ST
Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Maritim	Dr. Ir. Titik Sugiharto, Msi
Wakil Ketua Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat	Hj. Lastiani Warsih Wulandari, SE, MM
Wakil Ketua Bidang Energi SDA dan Lingkungan Hidup	Arie Pradipa Trihayani, S. Sos
Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat	HM. R Danu Waskito
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Daerah	Singgih Maryanto
Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak	Erni Irawati
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	Rh. Sumiharjo, SE
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja	Ir. Maria Lumban Toruan
Wakil Ketua Bidang Olahraga Pemuda dan Mahasiswa	Faisol Irawati
Sekretaris Wilayah	Drs. Aulia Reza Bastian, M. Hum
Wakil Sekretaris Bidang Kepengurusan, Keanggotaan, dan Kaderisasi	Khasanah Misbah, S. Hi
Wakil Sekretaris Bidang Internal dan	Cornus Dwisapha Hekseko,

Kesekretariatan	S,Sos
Wakil Sekertaris Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Erniata Kurniawati, SH, M.Kn
Wakil Sekertaris Bidang Eksternal	Endah Retnawati, SE
Bendahara Wilayah	H. Suparjiono
Wakil Bendahara Bidang Penggalangan Dana	Ir. E. Kuswandi, SH., MH
Wakil Bendahara Bidang Pengelolaan Asset	Anyaka Susanti Yanuari, S. Ip

Tabel 2.13
Daftar Nama Caleg DPRD I Provinsi Partai NasDem dan Hasil Rekapitulasi
Perolehan Suara Masing-Masing Kandidat

Nomor/Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara							Total
	DIY 1	DIY 2	DIY 3	DIY 4	DIY 5	DIY 6	DIY 7	
1. Partai NasDem	1,961	3,784	4,489	2,921	4,787	4,193	9,574	31,709
Dapil: DIY 1								
1 Drs. AULIA REZA BASTIAN, M. Hum.	1,414							1,414
2 Dra. ERNI FEBRUARIA, M. Si.	607							607
3 Drs. WIBISONO JOKO HARTONO, MBA.	264							264
4 Dra. YULIANI	318							318
5 H. MUHAMMAD BS.	190							190
6 MUHAMMAD HARYO SUBODRO, BSc.	166							166
7 HENI NURVITA, S.P., M.M.	211							211
Dapil: DIY 2								
1 Drs. SETI WIDODO		2,062						2,062
2 TUTIK YANUARTI		7,633						7,633
3 DIDA NURSAIDA		154						154
4 SURADJI, S.H.		238						238
5 CHRISPINA L.C WIDYASTANTRI, S.T.		150						150
6 TEGUH HARTONO, S. Sos.		143						143
7 SINGGIH MARYANTO, B.A.		128						128
Dapil: DIY 3								
1 SURYO PUTRO NUGROHO			6,304					6,304
2 Drs. H. ALIYANTO, M.Pd.			1,226					1,226
3 AYU PUSPITA ARRY ROCHMA NIDICI			286					286
4 R. SURYO HARDIHANDoyo, S.Sn.			397					397
5 Drs. MAHIDIN ATIEN DESKY, S.H.			122					122
6 RIRIN SULYANI, S.E., Akt.			226					226
Dapil: DIY 4								
1 drh. SABAR WIDODO				2,430				2,430
2 H.M. R. DANU WASKITO SHW.				894				894
3 ALIFAH NOOR RACHMAH ELVISTASARI				199				199
4 DANY DWIASTUTI ARINI				551				551
5 ROSALIA ENDAH WIDIASTUTI, S.H.				146				146
6 SUKIJAN				656				656
7 Drs. HERI PURWANTO				189				189
Dapil: DIY 5								
1 WISNU AJI SURYA PRABOWO, S.IP.					7,376			7,376
2 SUBARNO					10,291			10,291
3 Rr. AG. GIYANTI TITIK WARDANI, S.Pd., M.Pd.					623			623

4	ROHMAT KUSNADI					423			423
5	DEWI MAHARANI					240			240
6	ADI HERYADI, S.Psi., M.Psi.					154			154
7	Drs. SUTRISNO, M.A.					326			326
8	ANINDITA SARI KUSUMASTUTI, S.H.					209			209
9	AGUS BUDI RACHMANTO, S.IP., M.Si.					161			161
Dapil: DIY 6									
1	AMIN ZAKARIA, S.E., S.H., M.Si.						2,180		2,180
2	CORNUS DWISAPTHA HEKSEKO, S.Sos.						415		415
3	SINTA KUSUMANINGRUM						3,782		3,782
4	DWI MARCHAYATUN						368		368
5	YATIMAN, S.H.						408		408
6	SRI BUDYARTATI, S.S., M.Pd.						283		283
7	SAMBUDI, S.T.						4,354		4,354
8	H. SUDIBYO, S.T.						339		339
Dapil: DIY 7									
1	SUPARJA, S.IP.							12,506	12,506
2	SUNARDI, S.Pd.							5,032	5,032
3	ENDANG SUKMARANINGSIH							1,129	1,129
4	R.H. HERU WAHYU KISMOYO, S.Sos., M.Si.							883	883
5	BENI SUNTOKO, S.E.							3,161	3,161
6	MARIYA GORETI HARTINI							516	516
7	MUHAMMAD FAKHRUR ROZY							340	340
8	BAYU SUSANTO, S.E.							164	164
9	YULIA WAHYUNINGRUM							303	303
10	EXVAN DWI EFFENDI							92	92
11	IKA WAHYUNI							124	124
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon		5,131	14,292	13,050	7,986	24,590	16,322	33,824	115,195